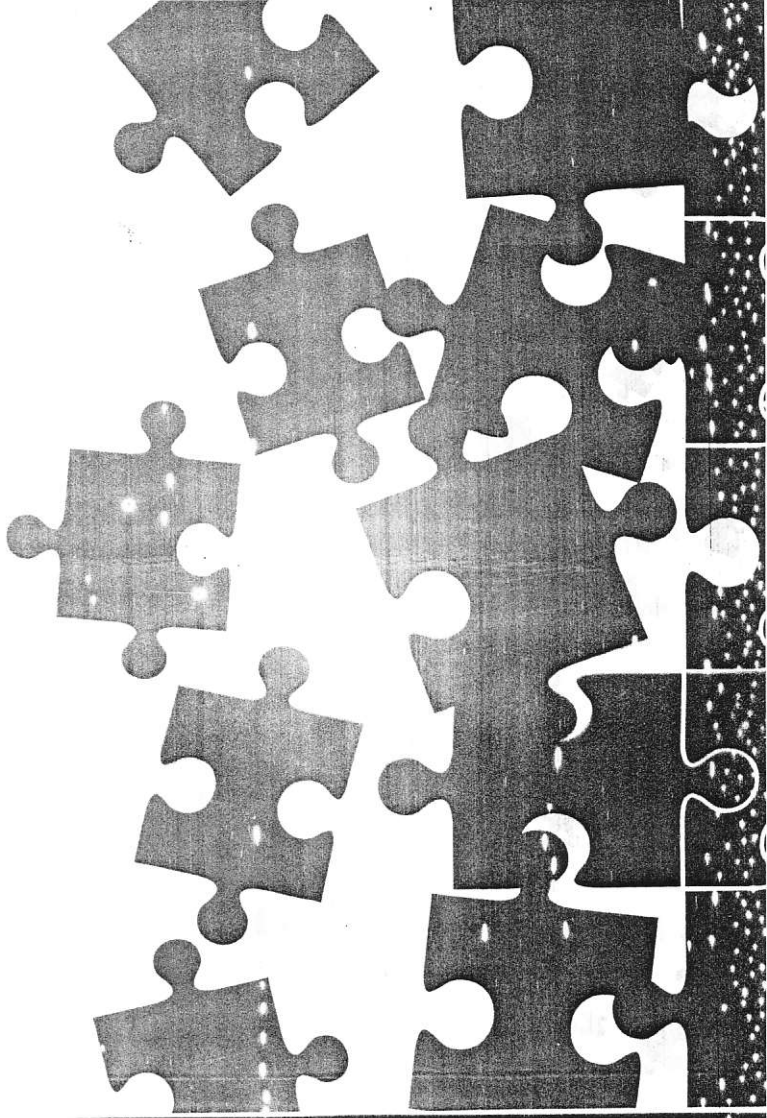


MAARIF

MEDAN SOSIAL

SETELAH BELA ISLAM:
GERAKAN SOSIAL ISLAM,
DEMOKRATISASI, DAN
KEADILAN SOSIAL



Penanggung Jawab

Ahmad Syaifi Maarif
Jeffrie Geovanie
Rizal Sukma

Pemimpin Umum

Fajar Riza Ul Haq

Pemimpin Redaksi

Ahmad Imam Mujadid Rais

Wakil Pemimpin Redaksi

Muhd. Abdullah Darraz

Redaktur Tamu

Zainal Abidin Bagir

Dewan Redaksi

Ahmad Najib Burhani
Ahmad-Norma Permata
Clara Juwono
Haedar Nashir
Hilman Latief
Luthfi Assyaukanie
M. Amin Abdullah

Sekretaris Redaksi

M. Supriadi

Redaktur Pelaksana

Khelmy K. Pribadi, Ahmad Imam Mujadid Rais

Pipit Aidul Fitriyana

Design Layout

Deni Murdiani, Harhar Muharam

Keuangan

Henny Ridhowati

Sirkulasi

Awang Basri, Pripih Utomo

Alamat Redaksi

MAARIF Institute for Culture and Humanity
Jl. Teber Barat Dalam II No. 6, Jakarta 12810
Telp +62-21 8379 4554 Fax +62-21 8379 5758
website : www.maarifinstitute.org
email : jurnal@maarifinstitute.org
mujadid.rais@gmail.com
darrazophy@yahoo.com

Donasi dapat disalurkan melalui rekening :
Yayasan A. Syaifi Maarif
BNI MH. Thamrin (Wisma Nusantara)
0114179273

Terbit Perdana Juni 2003

Redaksi mengundang para cendekiawan, agamawan, peneliti, dan aktivis untuk mengirimkan tulisan, baik berupa hasil penelitian maupun gagasan, sesuai dengan visi dan misi MAARIF Institute for Culture and Humanity. Tulisan merupakan hasil karya sendiri, belum pernah dipublikasikan, penulisan mengacu standar ilmiah yang telah ditetapkan oleh redaksi dengan panjang tulisan minimal 4000 kata (10 halaman, 1 spasi, A4) dengan batas maksimal 6000 kata (15 halaman). Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit tulisan tanpa mengurangi atau menghilangkan substansi. Jurnal MAARIF terbit 2 kali setahun (Juni dan Desember).

Pengantar Redaksi

Setelah "Bela Islam": Gerakan Sosial Islam, Demokratisasi, dan Keadilan Sosial	4
<i>Ahmad Imam Mujadid Rais dan Zainal Abidin Bagir</i>	

Aksi Bela Islam: Ragam Penjelasan

Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan.....	15
<i>Ahmad Najib Burhani</i>	
"Aksi Bela Islam," Akanakah Mengubah Lanskap Muslim Indonesia?.....	30
<i>Mohammad Iqbal Ahnaf</i>	
Aksi Bela Islam, Populisme Konservatif dan Kekuasaan Oligarki.....	43
<i>Ar.angga Pribadi Kusman</i>	
Ekonomi-Politik Aksi Bela Islam: Pluralisme dalam Krisis?.....	53
<i>Rizky Alif Ahwan</i>	
Keadilan Semu Penodaan Agama: Aksi Bela Islam, Ruang Publik dan Dilema Negara Hukum Demokratis	71
<i>Fiqh Wadiah Aulia Ali</i>	

Islam Moderat Indonesia: Terlalu Besar Untuk Gagal?

MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang.....	87
<i>Moch Nur Ichwan</i>	
Quo Vadis FPI Dalam Aksi Bela Islam.....	106
<i>Mark Woodward & Amanah Nurish</i>	
Ummat, Warga dan Ruang Kosong Pelayanan Dasar	125
<i>Abdul Gaffar Karim & Longgina Novadona Bayo</i>	
Muhammadiyah dan Aksi Damai Bela Islam : Rejuvenasi Politik Umat Islam?	137
<i>Zuly Qodir</i>	
Kematian Gus Dur dan Lahirnya Habitus Baru Kebinekaan Indonesia	138
<i>Ahmad Suaedy</i>	

Sisi-sisi Lain Aksi Bela Islam

Perempuan dan Media Dalam Aksi "Bela Islam"	159
<i>Alimatul Qibtiyah</i>	
Aksi Damai 411-212, Kesalehan Populer, dan Identitas Muslim Perkotaan Indonesia.....	172
<i>Muhammad Wildan</i>	
Solidaritas Islam dan Gerakan Sosial Pasca "Aksi Bela Islam" 2016	185
<i>Hilman Latief</i>	

Profil Penulis.....	254
Profil MAARIF Institute dan Profil Media	259
Petunjuk dan Format Penulisan Artikel	268

SETELAH “BELA ISLAM”: GERAKAN SOSIAL ISLAM, DEMOKRATISASI, DAN KEADILAN SOSIAL SUATU PENGANTAR

Ahmad Imam Mujadid Rais dan Zainal Abidin Bagir

Aksi Bela Islam (ABI) yang berlangsung tiga kali di penghujung tahun 2016 lalu meninggalkan banyak pertanyaan. Di antara banyak pertanyaan itu adalah: mengapa tiba-tiba terjadi serangkaian peristiwa itu? Apa (atau adakah) dampaknya yang lebih jauh bagi demokrasi Indonesia? Apakah ini telah mengubah peta gerakan Islam Indonesia? Edisi Jurnal MAARIF ini berangkat dari jawaban pertama yang bisa segera diberikan dan tidak sulit disepakati: bahwa peristiwa ini tidak terjadi dengan “tiba-tiba”. Tugas selanjutnya adalah menarasikan dengan lebih cermat faktor-faktor yang menyumbang rangkaian peristiwa tersebut—dan itu perlu dilacak hingga ke beberapa tahun sebelumnya, sampai sekitar tahun 1998, atau bahkan lebih jauh.

Pertanyaan-pertanyaan berikutnya adalah seberapa signifikan gerakan di akhir 2016 tersebut? Akankah ia bertahan lama, mengubah peta Indonesia, atau setidaknya peta gerakan Islam Indonesia? Ataukah ia akan segera hilang dengan berlalunya Pilkada DKI 2017, yang menjadi arena pergerakan itu? Karena itulah edisi jurnal ini, yang secara terfokus mengangkat peristiwa tersebut sebagai titik sentralnya, mengandung resiko bahwa ia melakukan *over-estimate* dan segera menjadi tak relevan.

Jika kemudian, dengan menyadari resiko tersebut, kami tetap memutuskan membuat edisi ini, itu karena sebetulnya, terlepas dari apa yang terjadi di akhir 2016 itu, sudah cukup lama kami merasa perlu untuk melihat ulang peta Islam Indonesia. Ide awalnya telah muncul di akhir 2015, setahun sebelum

ABI. Ketika itu MAARIF Institute sempat mengundang Robert Hefner dan memintanya untuk membantu keinginan melihat ulang peta Islam Indonesia itu.

Islam dan Demokrasi Pasca-1998

Tidak lama setelah Reformasi, Bob Hefner menerbitkan *Civil Islam* yang memberikan gambaran optimis tentang peran Muslim dalam demokratisasi Indonesia, dengan menunjuk khususnya pada dua organisasi Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini aktif mendorong demokratisasi melalui sistem pemilu yang demokratis, penegakan hukum, fatwa anti korupsi, mendorong *good governance*, serta aktif dalam pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui pendirian fasilitas pendidikan, kesehatan dan sosial. Kesemuanya berkontribusi dalam menciptakan kehidupan demokratis yang lebih baik (*Civil*). Tapi pada saat yang sama, ia sebetulnya juga menunjukkan bahwa ada kekuatan-kekuatan Muslim lain yang bergerak ke arah berbeda atau bahkan bertentangan.

Hampir dua dasawarsa setelah Reformasi, dan 15 tahun setelah gambaran optimis *Civil Islam* itu dipaparkan, lanskap Islam dan demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan. Martin van Bruinessen, misalnya, mencatat adanya *conservative turn*. Sementara sejarawan Merle Rickleff, di ujung jilid terakhir dari tiga bukunya yang membahas Islamisasi di Jawa sejak abad ke-14, melihat bahwa gerakan islamisasi kini telah mencapai titik yang tak bisa kembali lagi.

Episode terakhir yang baru-baru ini, menjelang akhir tahun 2016, muncul adalah serangkaian aksi “Bela Islam” yang berhasil memobilisasi amat banyak Muslim di Jakarta yang tampak mengejutkan banyak pengamat. Mengapa gerakan ini melaju bak bola salju yang terus membesar dan mendapat simpati secara luas dari masyarakat? Apakah serangkaian aksi “Bela Islam” (1, 2, 3) tersebut merupakan isyarat dari gambaran tentang Muslim Indonesia yang telah berubah?

Keterkejutan banyak orang atas aksi-aksi tersebut muncul dengan latar belakang anggapan bahwa Islam Indonesia, seperti yang kerap diiklankan, adalah model Islam yang toleran, damai dan, lebih jauh, mendukung cita-cita demokrasi. Sementara Gerakan “Bela Islam” dipicu oleh tuduhan spesifik tentang penodaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjahya Purnama, namun juga telah menyentuh banyak isu lain seperti munculnya kembali sentimen

- Heryanto, Ariel (ed). *Budaya Populer di Indoensia: Mencairnya Identitas Pasca-Orde Baru*. Yogyakarta: Jelasutra, 2012.
- Heryanto, Ariel. "Upgraded Piety and Pleasure: The New Middle Class and Islam in Indonesian Popular Culture", in A. N. Weintraub (ed.), *Islam and Popular Culture in Indonesia and Malaysia*, London: Routledge, 2011.
- Heryanto, Ariel. *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Ibrahim, Idi Subandy & Bachruddin Ali Akhmad, *Komunikasi & Komodifikasi: Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi*. Jakarta: Obor, 2014.
- Mahmood, Saba, *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. New Jersey: Princeton University Press, 2005
- Nasr, Vali. *The rise of Islamic capitalism: why the new Muslim Middle Class is the key to defeating Extremism*. New York: Free Press, 2009.
- Sindhunata. *Sakitnya melahirkan demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- <http://nasional.inilah.com/read/detail/2343444/muhammadiyah-apresiasi-aksi-212>
- <https://www.tempo.co/read/fokus/2016/11/22/3390/rencana-demo-2-desember-warga-nu-dan-muhammadiyah-diminta-tak-ikut> [diakses tanggal 26 Januari 2017].
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/869375-reaksi-habib-rizieq-dikukuhkan-jadi-imam-besar-umat-islam> dan <http://www.tarbawia.com/2017/01/video-kiyai-sepuh-nu-baiat-habib-rizieq.html> [diakses tanggal 26 Januari 2017].
- <http://pks.id/content/pernyataan-sikap-pks-terh.-dap-aksi-bela-islam-iii> [diakses tanggal 26 Januari 2017].
- <http://www.dobrak.net/2016/12/romantisme-aksi-212-kebanggaan-dan.html> [diakses tanggal 26 Januari 2017].
- <http://www.sorgemagz.com/pemaparan-vedi-r-hadiz-di-bedah-buku-islamic-populism-in-indonesia-and-the-middle-east-l-depok-jawa-barat-24-agustus-2016/#.W182XrFh2T8> [diakses 31 Januari 2017].
- <http://www.umm.ac.id/id/berita/prof-nakamura-muhammadiyah-social-safety-net.html> [diakses pada 27 Januari 2017].

SOLIDARITAS ISLAM DAN GERAKAN SOSIAL PASCA "AKSI BELA ISLAM" 2016

Hilman Latief

Abstrak

Artikel ini menganalisis fenomena Aksi Bela Islam (ABI), sebuah demonstrasi yang digelar secara berturut-turut oleh pelbagai organisasi keislaman dalam merespons masalah penistaan agama, dan implikasinya dalam perkembangan gerakan sosial di Indonesia. Argumen yang dikembangkan dalam tulisan ini adalah sejauhmana ormas dan tokoh-tokoh Muslim yang terlibat ABI mampu menjaga kohesivitas kelompok-kelompok yang ada di dalamnya dan menjaga isu yang diusungnya dalam jangka panjang. Tulisan ini menyatakan bahwa ABI merupakan sebuah "gerakan protes" dan "aksi solidaritas" yang akselerasinya menguat dalam konteks isu domestik, yaitu Pemilihan Gubernur Jakarta, yang rentan untuk dapat menjaga isunya dalam jangka panjang. Meski demikian, ABI dapat bertransformasi menjadi sebuah gerakan sosial dengan dampak jangka panjang lebih kuat bila ABI lebih serius menyusun isu besar yang dapat menjadi landasan dalam perubahan sosial-politik dan sosial-ekonomi pasca Pilkada DKI Jakarta.

Kata Kunci: Solidaritas Islam, gerakan protes, gerakan sosial, perubahan kolektif.

Pendahuluan

Gerakan solidaritas Islam yang mampu melakukan mobilisasi secara massif memang bukan hal baru di Indonesia. Ada banyak peristiwa, baik dalam konteks keagamaan ataupun di luar keagamaan, yang bertujun pada mobilisasi massa untuk menyuarakan pendapat secara terbuka melalui demonstrasi. Gaya untuk menyatakan pendapat melalui "parlemen jalanan" sudah menjadi makanan

sehari-hari gerakan mahasiswa di Indonesia. Kebijakan pemerintah yang tidak populis, dianggap menyengsarakan rakyat banyak, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lapisan bawah, maupun keputusan politik yang otoriter dan jauh dari semangat demokrasi kerap direspons oleh gerakan mahasiswa melalui demonstrasi. Sementara di kalangan Muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia, demonstrasi sering dilakukan kelompok-kelompok Islam untuk merespons pelbagai peristiwa yang tentunya terkait dengan isu-isu sosial-keagamaan dan politik-keagamaan. Isu yang diangkat juga sangat beragam, mulai dari solidaritas terhadap peristiwa-peristiwa politik di negara-negara Islam di Timur Tengah sampai pada demonstrasi ketidaksetujuan pendirian rumah ibadah oleh non-Muslim.

Pada beberapa tahun terakhir, dari sejumlah demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Muslim baik untuk merespons isu domestik maupun internasional, "Aksi Bela Islam" (ABI) 2016 adalah demonstrasi yang paling fenomenal, setidaknya dilihat dari jumlah peserta yang hadir. Tentu saja, proses penggalangan massa dalam demonstrasi tersebut tidak bersifat instan, melainkan melalui proses secara bertahap. ABI yang dimaksud di sini adalah 3 bentuk aksi massa yang digalang oleh beberapa kelompok Muslim dengan mengusung isu "penistaan agama" yang dianggap telah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal dengan panggilan "Ahok". Aksi bela Islam didukung oleh massa demonstrasi yang jumlahnya lebih kecil pada ABI 1, kemudian berkembang menjadi lebih besar pada ABI 2 (4 November atau 411), dan menjadi sangat besar pada ABI 3 (2 Desember atau 212).

Berbeda dengan aksi-aksi yang lain, ABI mendapat perhatian besar dari massa dan banyak ormas Islam, tidak hanya dari Jakarta yang saat itu dalam situasi politik yang panas karena pemilihan gubernur, tetapi juga dari massa dan ormas yang berada di luar Jakarta bahkan luar pulau Jawa. Ormas-ormas Islam bergabung dalam aksi ini juga bermacam-macam, dan tokoh-tokoh yang terlibat atau dilibatkan juga beragam, tetapi kebanyakan mereka adalah tokoh yang memiliki basis dukungan jamaah yang banyak. Tentu saja ini menjadi fenomena yang menarik untuk melihat dari perspektif gerakan sosial dan solidaritas Islam khususnya tentang apa sebetulnya isu bersama yang "mengikat" kelompok-kelompok Islam dan beberapa tokoh keagamaan untuk bersatu dalam aksi tersebut? Bagaimana sebuah gerakan solidaritas dalam bentuk demonstrasi dapat mempreservasi isu yang diusungnya dalam waktu jangka panjang? Bagaimana pula proses penanaman ideologi yang dapat mendukung bertahannya ikatan solidaritas tersebut?

Solidaritas Islam: Gerakan Sosial, Protes, atau Politik?

Gerakan solidaritas Islam pada umumnya digalang oleh aktivis Muslim dalam merespons peristiwa yang terjadi di dunia internasional. Gerakan solidaritas Islam di sini dapat didefinisikan sebagai gerakan yang terdiri dari pelbagai kelompok yang berbeda namun memiliki satu kepentingan 'sementara' yang sama untuk menyatakan pendapat atau menyuarakan aspirasi dalam memperjuangkan kepentingan kaum Muslim baik dalam konteks nasional dan internasional. Bila kita membaca sejarah gerakan Islam pada tahun 1980an dan 1990an, kita bisa menyaksikan pelbagai aksi massa besar yang digalang melalui sebuah demonstrasi. Tema-tema yang diusung dalam aksi solidaritas yang bernuansa protes terkait banyak hal, misalnya tentang peran Barat yang dominan dalam konflik dan peperangan di Timur Tengah, pendudukan Israel di wilayah Palestina, penindasan Muslim (minoritas) oleh kelompok non-Muslim mayoritas, konflik antar agama, dan sebagainya.

Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI) dapat menjadi salah satu contoh gerakan solidaritas yang digalang umat Islam Indonesia dalam merespons masalah-masalah politik di dunia Islam. KISDI didirikan dan dipimpin oleh Ahmad Sumargono, seorang aktivis dakwah yang juga menjadi pentolan di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), sebuah organisasi dakwah yang didirikan oleh Mohammad Natsir, pendiri dan mantan Ketua Umum Partai Masyumi.¹ KISDI kerap melakukan gerakan protes melalui aksi massa untuk menyatakan pendapat dan keberatan terhadap dominasi Barat di dunia Islam, secara umum, maupun terhadap tindakan Israel terhadap warga Palestina. KISDI tidak sendirian, belakangan muncul beberapa organisasi solidaritas Islam lainnya yang dibentuk tokoh-tokoh dan aktivis dakwah Islam di Indonesia.² Organisasi-organisasi solidaritas Islam di Indonesia tidak hanya menyuarakan pendapat, melainkan juga menggalang bantuan untuk kelompok-kelompok Muslim yang tertindas akibat dominasi kekuatan Barat.

Di Indonesia, Partai Keadilan (atau Partai Keadilan Sejahtera), Laskar Jihad, Majelis Mujahidin dan Hizbut Tahrir Indonesia di awal tahun 2000an juga kerap muncul menggalang demonstrasi untuk merespons pelbagai isu. Fenomena yang sama juga bisa kita lihat di beberapa negara Muslim lainnya. Begitu pula dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Jordan, Jamiat Ulama-

1. Tentang pergulatan politik Masyumi secara genealogi keagamaan dan gerakannya, lihat Rémy Madinier, *Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism* (Singapore: National University of Singapore, 2015).

2. Organisasi solidaritas Islam yang didirikan oleh tokoh-tokoh Muslim di Indonesia untuk merespons persoalan-persoalan politik di dunia Islam antara lain: KSI, KISPA, KNRP, dan lain-lain.

Islam di Pakistan, dan sebagainya. Kelompok-kelompok tersebut bukan hanya tampil di publik, melainkan juga memelihara tema diskursusnya yang menjadi tujuan ideologis masing-masing.³ Penting untuk melihat bagaimana transformasi ideologi dapat ataupun tidak dapat dilakukan dalam sebuah gerakan massa yang semata gerakan protes atau lebih khususnya lagi gerakan yang berbasis solidaritas.

Salah satu aksi (solidaritas) yang melibatkan massa begitu banyak untuk melakukan demonstrasi dan menyatakan pendapat di ruang publik yang dapat kita perbandingkan dengan Aksi Bela Islam adalah Gerakan Mahasiswa dan kelompok-kelompok anti pada akhir pemerintahan Soeharto. Gerakan mahasiswa di Indonesia yang bersikap kritis terhadap rezim Orde Baru sudah tumbuh sejak tahun 1970an. Pada tahun 1980an gerakan mahasiswa terus berlanjut dan bahkan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk me-Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) tahun 1978 dan mengeliminasi fungsi-fungsi politik mahasiswa. Namun banyak faktor yang terus mendorong gerakan mahasiswa untuk tumbuh, kendati pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan yang represif. Ujung-ujungnya, ketika negara menghadapi krisis ekonomi dan berujung pada krisis politik pada tahun 1997 dan 1998, gerakan mahasiswa mengental menjadi sebuah gerakan (revolusi) politik yang keluar dengan satu tujuan: meruntuhkan rezim Orde Baru dan menurunkan Soeharto.

Proses menjatuhkan rezim Orde Baru di tahun 1998 melalui serangkaian demonstrasi yang massif adalah sebuah titik kulminasi dari penguatan diskursus di kalangan aktivis mahasiswa dan kelompok-kelompok kritis selama bertahun-tahun. Kelompok-kelompok diskusi para aktivis kerap digelar, seminar, dan pelatihan kader untuk menanamkan ideologi perubahan oleh organisasi-organisasi yang anti rezim dilakukan belasan tahun sehingga gerakan sosial dan intelektual menjadi gerakan politik. Dalam protes terhadap rezim Suharto yang dipicu oleh krisis ekonomi di tahun 1997, ratusan ribu dan bahkan jutaan mahasiswa ke jalan, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota-kota besar di seluruh pelosok Indonesia. Gerakan mahasiswa di tahun 1998 juga mendapat dukungan dari banyak pihak, mulai dari para pensiunan jenderal maupun jenderal aktif yang tidak suka dengan Orde Baru, para akademisi dan intelektual, aktivis LSM, dan sebagainya.

Gerakan mahasiswa bertransformasi menjadi sebuah 'revolusi' dengan

³ Quintan Victorwicz (ed.), *Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach* (Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press, 2004), hlm. 1-2.

perubahan yang mereka inginkan: jatuhnya Orde Baru. Sementara itu, gerakan solidaritas, bisanya lebih cair dan hanya diikat oleh isu-isu yang bersifat sementara atau jangka pendek. Oleh karena, banyak gerakan solidaritas yang tidak dapat menjaga isu jangka panjang sehingga perjuangan mereka 'menguap' di tengah jalan sebelum cita-cita besarnya terwujud. Untuk itu, pembahasan tentang gerakan Aksi Bela Islam ini akan dibingkai secara komparatif, dengan mencermati fenomena serupa di masa lalu yang terjadi di Indonesia maupun di negara Muslim lainnya.

Aksi Bela Islam (ABI) 2016 memang berbeda dengan gerakan mahasiswa 1998, meskipun sama-sama melibatkan banyak massa, ratusan ribu dan bahkan dilaporkan lebih dari satu juta orang. ABI mungkin juga tidak sama dengan demonstrasi pra-revolusi Iran di akhir tahun 1970an dan Arab Spring beberapa tahun lalu di Tunisia, Mesir, Libya dan lain-lain. ABI memiliki keunikan sendiri, pemicunya bersifat sangat lokal atau domestik, yaitu masalah Pemilihan Gubernur, yang kemudian membesar karena resonansi diskursus tentang penistaan agama yang dianggap telah dilakukan oleh calon gubernur DKI Jakarta dari etnik minoritas Tionghoa. ABI merupakan kulminasi dari serangkaian demonstrasi yang benihnya juga ditanamkan oleh kelompok aktivis Islam, khususnya yang bernaung di bawah Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin Rizieq Shihab.

FPI adalah sebuah organisasi yang didirikan di Jakarta tahun 1998 setelah runtuhnya Soeharto, dan kerap aktif muncul di ruang publik untuk melakukan apa yang mereka sebut "Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar" yang artinya "memerintah kepada kebaikan dan melarang atau memberantas kemunkaran". Berbeda dengan organisasi Islam lainnya, FPI mengklaim bahwa mereka fokus kepada "Nahi Munkar" dengan melakukan penyisiran dan sweeping terhadap tempat-tempat tertentu yang dipandang tempat maksiat atau terlarang oleh hukum, baik hukum Islam maupun hukum nasional, seperti tempat penjualan miras ilegal, diskotik, panti-panti pijat yang diindikasikan menjadi tempat prostitusi, dll.⁴ Belakangan aksi-aksi FPI juga sudah merambah pada isu antaragama, termasuk konflik dengan pihak gereja Kristen, komunitas Ahmadiyah, dan kelompok Syiah.

Banyak lembaga atau organisasi Islam yang terlibat di dalamnya ABI, terutama ketika MUI mengeluarkan pernyataan dalam merespons pernyataan Gubernur

⁴ Kajian yang cukup lengkap tentang sejarah dan FPI data dibaca dalam Jajang Jahroni, "Defending the Majesty of Islam: Indonesia's Front Pembela Islam (FPI) 1998-2003," *Studi Islamika*, Vol. 11, No. 2 (2004), hlm. 197-256.

DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang kepemimpinan non-Muslim. Ahok dianggap oleh MUI telah melakukan penistaan agama dan para ulama.⁵ Pasca MUI mengeluarkan pernyataan tentang status pernyataan Ahok, beberapa organisasi Islam membentuk GNPF-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-MUI) yang kemudian berperan sebagai pengorganisasi aksi demonstrasi. Aksi digelar beberapa kali dengan tuntutan agar Ahok diadili dan dihukum dengan pasal penistaan.

Gerakan Islam yang kerap melibatkan banyak massa melalui aksi demonstrasi untuk menyuarakan pendapatnya, tentu bukan khas Indonesia. Selanjutnya, kita dapat melakukan analisis dengan membandingkan ABI dengan apa yang terjadi di Mesir dan Iran. Asef Bayat membandingkan gerakan Islam dan revolusi di Iran dan Mesir. Dalam artikelnya yang berjudul "*Revolution without Movement, Movement without Revolution: Islamist Activism in Iran and Egypt, 1960s-1980s*"⁶ ini, Asef Bayat membandingkan dua situasi besar dan karakteristik gerakan Islam di Mesir dan Iran dengan mengajukan pertanyaan fundamental, yaitu: mengapa mobilisasi massa yang terjadi di Iran sampai berujung pada sebuah revolusi kekuasaan, sementara di Mesir tidak terjadi hal yang sama, padahal keduanya diwarnai oleh apa yang disebut Bayat dengan "ketidakpuasan atau kecewaan publik" (*popular discontent*).

Dalam memahami gerakan massa, Bayat membedakan antara gerakan protes atau "gerakan perlawanan" (*insurrectionary movement*) dari gerakan sosial (*social movements*). Apa yang terjadi di Iran pada tahun 1978 ketika rezim Shah jatuh lebih merupakan gerakan perlawanan yang berupaya menegasikan atau menggantikan pemerintahan yang ada saat itu. Sementara itu, gerakan sosial seperti yang terjadi di Mesir—dan dikelola dengan baik oleh gerakan Islam seperti seperti Ikhwanul Muslimin—berupaya menggantikan sistem yang ada, untuk membangun institusi dan sistem nilai alternatif sebelum adanya perubahan total.⁷ Bayat juga menggambarkan bahwa meskipun bentuk lahiriahnya hampir sama, tetapi gerakan sosial berbeda dengan kelompok-kelompok pencari kekuasaan, seperti partai politik, kelompok-kelompok kecil diskusi, maupun gerakan bawah tanah yang tidak dukung gerakan massa yang kuat. Bila kita menggunakan bingkai teoretis di atas, dapat kita ajukan pertanyaan sebagai

5 Kejadian ini bermula dari kunjungan Kerja Ahok sebagai gubernur di Kepulauan Seribu dan berdialog dengan warga. Di tengah-tengah dialog, Ahok juga menyinggung masalah politik tentang pemilihan pemimpin dan mengemukakan tentang ayat al-Qur'an surat al-Maidah 51, tentang hubungan Muslim dan non-Muslim atau lebih tepatnya tentang memilih pimpinan non-Muslim.

6 Asef Bayat, *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn* (Stanford: Stanford University Press, 2007), hlm. 16-17.

7 Asef Bayat, *Making Islam Democratic*, hlm. 18.

berikut: Apakah Aksi Bela Islam (ABI) dapat dikategorikan sebagai sebuah gerakan sosial, gerakan protes, ataukah gerakan politik?

Gerakan sosial Islam (*Islamic social movement*) pada umumnya dibina dengan sebuah bentuk ideolog tertentu yang telah dirumuskan pencetusnya, seperti gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir, Hizbut Tahrir di Palestina, Gerakan Gullen di Turki, PKS dan Majelis Mujahidin di Indonesia. Mereka bukan hanya sebuah gerakan protes tetapi telah berwujud dalam sebuah organisasi dan gerakan sosial yang solid dan dibina secara sistematis. Rumusan ajaran yang dirumuskan oleh para ideolog organisasi tersebut di atas bisa dibaca dimanamana dan dapat dipelajari oleh banyak orang. Tidak heran bila gerakan dan organisasi transnasional seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Gullen dan juga Salafi cukup massif dan tampil dalam bentuk yang 'seragam' (meski ada dinamikanya) dan memiliki tujuan atau cita-cita jangka panjang yang sama.

Aksi Bela Islam 2016 memang unik karena aksi ini beririsan dengan banyak aspek, khususnya irisan politik yang terkait dengan posisi Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu penting untuk dicermati apa yang akan terjadi pasca pemilihan gubernur DKI dan siapa yang akan menjadi pemenangnya untuk menguji apakah ABI hanya sebuah gerakan protes yang sifatnya sementara ataukah akan bertransformasi menjadi gerakan sosial jangka panjang yang mencoba menyusun perubahan dengan memberikan institusi dan nilai-nilai alternatif.

Sebuah gerakan sosial memiliki proses panjang dan dampak jangka panjang. Aksi Bela Islam tidak dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan politik dalam pengertian—meminjam Asef Bayat—"power seeking political parties", kecuali bila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa penggerak dari ABI ternyata berafiliasi dengan—atau menjadi patron dari—partai politik tertentu dalam perebutan kekuasaan. Pada saat yang sama, penulis melihat bahwa ABI bukan pula sebuah gerakan sosial (*social movement*) karena tidak didukung oleh proses panjang merumuskan ide dan gagasan perubahan yang ditopang oleh kajian yang sistematis serta institusi yang mapan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, penulis melihat bahwa massifnya gerakan ABI, terutama pada aksi yang 'terakhir' atau 2 Desember 2016 yang melibatkan jutaan orang merupakan salah satu bentuk dari gerakan solidaritas untuk sebuah protes.

Kerentanan dan Kohesivitas Gerakan Solidaritas

ABI adalah gerakan protes berbasis solidaritas yang direkatkan oleh sebuah isu tentang penistaan agama dan, dalam konteks lain, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Banyak tokoh-tokoh Muslim yang hadir dalam ABI yang memiliki jamaah dalam jumlah besar, namun mereka memiliki pola dakwah yang berbeda satu sama lain serta membawa topik-topik ceramah yang juga tidak sama. Beberapa tokoh Muslim atau pimpinan ormas dan pimpinan majlis taklim, seperti Abdullah Gymnastiar ("Aa Gym") pimpinan Pesantren Daarut Tauhid di Bandung, Muhammad Arifin Ilham pimpinan Majelis Zikir Az-Zikra, Habib Rizieq Shihab Imam Besar FPI, Bachtiar Nasir Ketua CNPF yang juga Sekretaris Jenderal I Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Kyai Ma'ruf Amin Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan tokoh-tokoh dari ormas Islam lainnya yang memiliki banyak jamaah mampu duduk bersama-sama dalam ABI untuk mengusung isu bersama: protes atas masalah penistaan agama. Tidak sedikit pula tokoh-tokoh Islam lokal dari pelbagai daerah, terutama dari kota satelit di Jawa barat, dan kota-kota besar lainnya yang hadir untuk memberikan dukungan kepada ABI.

Bila kita cermati lebih jauh, terdapat karakter model dakwah yang berbeda dari masing-masing tokoh Islam disebut di atas, setidaknya yang sering tampil diberitakan di dalam televisi ataupun media. Aa Gym adalah seorang muballigh yang sangat dikenal dengan keramahannya. Gaya ceramahnya yang lembut dan humoris serta inspiratif bagi kalangan kaum muda maupun keluarga. Dakwah Aa Gym memiliki karakteristik tema yang khas yang terkait dengan dorongan untuk membangun akhlak bagi generasi muda. Ia sangat jarang berbicara politik, dan apalagi yang terkait dengan Pemilu secara langsung.⁸ Sementara itu, Muhammad Arifin Ilham sebagai ketua Majelis Zikir memiliki tema dakwah yang juga spesifik, yaitu mendorong peningkatan spiritualitas dan kesadaran keagamaan kaum Muslim melalui zikir. Dalam konteks tertentu, model pengajian Arifin ilham menyerupai atau mendekati gaya suluk atau tasawuf. Begitu pula Kyai Ma'ruf Amin yang mewakili MUI, sangat jarang terlibat dalam gerakan yang melibatkan aksi massa. Sebagai ketua MUI, Kyai Ma'ruf Amin yang juga merupakan ketua Rais 'Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, memiliki koneksi dan relasi yang kuat untuk berkomunikasi dengan aparat pemerintahan, termasuk Presiden, ketika menyuarakan aspirasi. Di lain pihak, organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berusaha

⁸ Terkait dengan profil Abdullah Gymnastiar dan model dakwahnya, lihat James Bourk Hoestery, *Rebranding Islam: Piety, Prosperity and a Self-Help Guru* (Stanford California, Stanford University Press, 2016)

menjaga jarak dengan ABI. Kedua organisasi ini tidak memberikan pernyataan yang tegas terhadap posisi ABI maupun tentang penistaan agama. Keduanya juga meminta kader dan warga untuk tidak membawa atribut organisasi bila terlibat dalam kegiatan ABI. Pasalnya, di balik penampilan publik kedua organisasi, terdapat perdebatan panjang apakah ABI merupakan sebuah gerakan protes semata-mata terhadap pernyataan Ahok (Calon Gubernur DKI), ataukah memang digerakkan secara politik semata-mata untuk menjegal pencalonan Ahok.

Karena itu, ada dualisme atau nuansa perspektif yang beragam dari para aktivis Muhammadiyah dan NU. Di satu sisi, warga dan simpatisan organisasi ini banyak yang memberikan dukungan terhadap ABI sebagai bagian dari solidaritas, sementara di tingkat elite kedua organisasi ini masih berhati-hati dengan nuansa politis dari gerakan ABI. Pada akhirnya, perkembangan sosial politik menjelang demonstrasi dimana dipandang terjadi proses "moderasi" melalui aksi damai, beberapa tokoh elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ikut berpartisipasi dan bahkan Presiden dan petinggi negara, termasuk pihak kepolisian dan militer ikut mendampingi.

Keterlibatan banyak elemen dan ormas Islam dalam ABI mengundang beberapa pertanyaan, apakah kohesivitas ormas dalam gerakan ABI dapat bertahan lama ataukah rentan untuk 'mencair' setelah 'membeku' dalam satu aksi demonstrasi? Tentu banyak faktor yang bisa mempengaruhi konfigurasi gerakan Islam dan kohesivitas ormas yang terlibat dalam ABI. Di satu sisi, ABI adalah sebuah momentum yang dianggap strategis karenanya adanya "kesempatan politik" (*political opportunity*) bagi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan, termasuk klik politik di luar ormas-ormas Islam, untuk melakukan mobilisasi. Pasca ABI, Polisi Republik Indonesia (POLRI), justru menangkap beberapa orang yang dianggap 'makar' di luar ormas-ormas Islam untuk dimintai keterangan.

Beragamnya latar belakang dan karakteristik ormas Islam yang berada dalam ABI menjadi tantangan tersendiri bagi ABI dalam menjaga kohesivitasnya, apalagi pasca demonstrasi isu politik semakin liar diwarnai saling serang antara yang pro dan kontra dari ABI, atau tepatnya pro dan kontra antara pendukung dan musuh politik Ahok. Sebagai sebuah gerakan solidaritas, kekuatan isu menjadi kunci untuk menjaga kohesivitas antar kelompok yang berbeda untuk tetap sejalan dan mentransformasikan energi yang mereka miliki untuk membuat perubahan yang diinginkan. Artinya, bila ABI hanya ditujukan atau

hanya untuk menargetkan Ahok dipenjarakan agar tidak dapat memimpin DKI Jakarta, maka jelas bahwa ABI dapat dikategorikan sebagai sebuah gerakan protes. Dalam konteks ini, mungkin bisa kutip pernyataan Asef Bayat tentang karakteristik gerakan protes:

“...protest movements, which may culminate in insurrections, are usually transitory and do not last long. They either achieve their goal or are suppressed. Since they directly challenge the political authority, the most critical element of a protest movement is sustainability.”⁹

(...gerakan-gerakan protes yang boleh jadi berakhir dalam bentuk perlawanan, biasanya bersifat sangat sementara dan tidak berlaku panjang. Mereka bisa saja meraih tujuannya atau sebaliknya bisa tertekan (tertindas). Karena mereka langsung berhadapan/bertentangan dengan otoritas politik, yang paling rentan/kritis dan sebuah gerakan protes adalah keberlanjutannya)

Oleh karena itu, pasca ABI 3, kelompok-kelompok yang ada kembali kepada habitatnya masing-masing dan kembali menjalankan aktivisme sosial-dakwah sebagaimana karakteristik unik yang dimiliki oleh masing-masing kelompok. Rasa solidaritas yang sempat menguat untuk dapat menyatukan langkah mungkin masih ada di masing-masing kelompok, namun menjaga keberlanjutan gerakan Islam sesuai dengan model dakwah yang dimiliki oleh masing-masing kelompok menjadi lebih penting. Pasalnya, sebagai sebuah gerakan, ormas-ormas Islam memiliki masa depan yang lebih panjang dan proyek keummatan yang dampaknya juga lebih luas dan bertahan lama (*a longer time span*), sementara sebuah gerakan protes yang berbasis solidaritas hanya untuk jangka pendek saja (*a short life-span*).

Tantangan Mengelola Isu Bersama: Keadilan dan Demokrasi

Dalam hiruk pikuk ABI tahun lalu, beberapa masalah yang diangkat oleh para pendukung ABI mencakup banyak hal. Di luar masalah penistaan agama, persoalan-persoalan lain yang cakupannya lebih muncul dan menjadi bahan diskusi publik. Beberapa hal yang diperdebatkan antara lain tentang masalah keadilan sosial, dominasi ekonomi oleh kelompok tertentu, datangnya ribuan pekerja asal China, kebangkitan komunisme dan atau lebih tepatnya PKI, dominasi Barat atas dunia Islam, upaya pihak lain untuk mengancam Islam di Indonesia dan sebagainya. Di lihat dari tipikal masalah atau isu yang mengemuka belakangan ini, dapat dipahami bahwa isu serupa selalu menjadi

⁹ Asef Bayat, *Making Islam Democratic*, hlm. 19.

perdebatan publik sejak lama. Hal itu tidak hanya terjadi di era Jokowi saat ini, melainkan juga menjadi isu ketika era Soeharto. Di era Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto, masalah-masalah yang diangkat oleh publik aktivis Muslim tidak jauh berbeda, yaitu masalah ketimpangan ekonomi, dominasi ekonomi oleh etnik Tionghoa, sikap negara yang dianggap tidak ramah terhadap Islam, dan sebagainya.

Dalam konteks inilah sebetulnya gerakan sosial Islam menjadi relevan untuk didiskusikan. Masalah-masalah atau isu-isu yang disebutkan di atas adalah isu yang terus dikelola, terlepas sesuai fakta atau tidak, untuk dapat memupuk energi ideologis para aktivis Muslim. Menarik pula untuk dicatat bahwa pada tahun 1990an, ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), sebuah lembaga yang dibentuk aktivis-aktivis Muslim, khususnya di kalangan modernis, juga merumuskan masalah yang tidak jauh berbeda, meski cara menyajikan dan menyelesaikan problematikanya bukan melalui aksi-aksi protes. Pasalnya pada era Orde baru ICMI mendapatkan sambutan yang lebih terbuka dari pemerintah. Apalagi, pada waktu itu, ICMI juga menjadi ‘aliansi’ strategis pemerintah.¹⁰ Dalam konteks keadilan ekonomi, selain banyak para aktivis ICMI menulis karya-karya di bidang ekonomi, ICMI juga mendorong dan mengadani pengusaha-pengusaha ‘pribumi’ untuk dapat berkembang di pentas nasional dan bahkan internasional. Lagi-lagi, perlu ditekankan di sini adalah bahwa ICMI bukan hanya sekedar sebuah aksi dengan target jangka pendek di luar fakta bahwa aspek politik Islam menjadi daya dorong lahirnya ICMI. ICMI juga merupakan imajinasi dan cita-cita untuk mengubah derajat kaum Muslim melalui jalur-jalur politik tingkat tinggi.

Organisasi atau gerakan Islam yang bertahan lama dan proyeksi jangka panjang juga sudah dilakukan oleh ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, dan ormas-ormas lainnya yang selama berpuluh tahun harus ‘menari’ dan bernegosiasi dengan periode atau rezim politik yang berbeda. Pelayanan sosial di bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren, sekolah, klinik, panti asuhan dan lain sebagainya, memberikan ruang bagi aktivis organisasi-organisasi atau gerakan Islam di atas untuk menjaga isu dan menuangkan strateginya dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial, ekonomi dan politik. Di dunia internasional gerakan protes atau gerakan Islam lainnya yang lebih revolusioner seperti yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Hizbullah di Libanon juga

¹⁰ Lihat misalnya Robert W. Hefner, “Islam, State, and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class,” *Indonesia*, No. 56 (Oct., 1993), hlm. 1-35; juga Yudi Latif, *Indonesian Muslim Intellectuals and Power* (Singapore: ISEAS, 2008) hlm. 426-429.

tidak lepas dari aktivisme sosial melalui layanan-layanan di pelbagai bidang untuk komunitas Muslim.

Dalam konteks ABI, saya tidak berpretensi untuk memberikan penilaian akhir bahwa ABI hanyalah sebuah gerakan protes jangka pendek semata. Dalam tulisan ini, saya ingin menekankan juga bahwa gerakan solidaritas dan protes sangat berpotensi bertransformasi menjadi sebuah gerakan sosial jangka panjang bila ditopang oleh diskursus yang kuat. Meskipun untuk mencapai transformasi seperti itu ada banyak tantangan yang dihadapi. Tidak lama setelah ABI, masalah keadilan ekonomi mendapatkan perhatian dari aktivis Muslim dan upaya itu kemudian diterjemahkan untuk membangun kreativitas ekonomi melalui lembaga-lembaga yang dapat mendorong kemandirian. Meskipun gegap gempita masalah kemandirian ekonomi ini sudah tersebar melalui media-media sosial, kita masih belum dapat menyaksikan secara kongkret karena memang masih cukup panjang waktu untuk membuktikannya.

Secara simbolik memori ABI 212 coba diabadikan melalui gagasan pembentukan Koperasi Syariah 212 yang proses pendiriannya dihadiri oleh ribuan orang. Beberapa dewan penasehatnya, yang disusun kemudian, merupakan tokoh yang memiliki peran dalam aksi damai 212, antara lain Abdullah Gymnastiar, Arifin Ilham dan Ma'ruf Amin. Dapat dikatakan di sini bahwa benih untuk transformasi menjadi gerakan sosial dapat lahir dari gerakan aksi, meskipun, perlu dicatat, bahwa aktor-aktor dan tokoh-tokoh lain dari kelompok Islamis yang menggalang aksi protes justru tidak terlihat di dalam struktur Koperasi Syariah 212. Sementara itu, pada bagian Dewan Pengurus, nama-nama yang muncul adalah nama yang sudah cukup akrab di dalam gerakan ekonomi dan filantropi Islam di Indonesia.¹¹

Aspek lain yang dapat dicermati adalah tentang demokrasi. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Indonesia memberikan ruang yang terbuka bagi siapa saja untuk maju menjadi pimpinan dalam pemerintahan, khususnya di tingkat gubernur, bupati, camat, dan sebagainya. Dalam konteks ini, perbedaan agama, meskipun terus menjadi bahan perdebatan selama bertahun-tahun, tidak banyak melahirkan bentuk-bentuk protes dan aksi massa yang begitu banyak, kecuali oleh kelompok-kelompok atau organisasi Islam tertentu. Dalam konteks kepartaian, tercatat bahwa partai-partai Islam kerap berkolaborasi dengan partai-partai dalam mengusung calon Gubernur atau Bupati. Di beberapa provinsi atau kabupaten, koalisi partai

¹¹ <https://www.koperasisyariah212.co.id/>

Islam untuk mendukung calon pimpinan politik yang non-Muslim terjadi, seperti di Kalimantan, Sumatra, Bali, Surakarta, dan sebagainya. Artinya, dalam diskursus partai politik, termasuk partai politik Islam, masalah keagamaan bukan satu-satunya faktor yang menentukan dalam melakukan aliansi politik. Artinya, partai-partai politik berpartisipasi dalam sistem demokrasi yang tengah dibangun di Indonesia.

Dalam konteks Pemilihan Gubernur Jakarta, PPP (Partai Persatuan Pembangunan), salah satu partai Islam yang dipimpin oleh Djan Fariqz, memberikan dukungannya kepada Ahok, dan dalam beberapa forum Ahok juga diundang oleh Nahdlatul Ulama dalam acara-acara keagamaan seperti Istighatsah. Dalam konteks hiruk pikuk pemimpin non-Muslim, partai politik Islam lainnya, seperti PKS, mengeluarkan pernyataan bahwa memilih pemimpin non-Muslim diperbolehkan. Bahkan, dalam beberapa Pilkada di daerah lainnya, PKS telah memberikan dukungan kepada calon-calon non-Muslim, seperti di Surakarta Jawa Tengah dan Kepulauan Sula, Maluku Utara.

Terlepas dari kontroversi pemikiran dan pendapat keagamaan tentang kepemimpinan non-Muslim, apa yang dilakukan partai-partai politik Islam menunjukkan bahwa mereka telah masuk ke dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia. Tantangan yang selanjutnya dapat dicermati adalah apakah yang menjadi bagian dari ABI merupakan penolakan murni terhadap pemimpin non-Muslim, ataukah penolakan terhadap Ahok yang pernyataan-pernyataannya sering memunculkan polemik dan kontroversi dengan beberapa kelompok Islam, khususnya FPI. Hal inilah yang juga menjadi bagian dari konsistensi menjaga isu dapat dilakukan oleh pegiat ABI di masa akan datang dan di luar konteks DKI Jakarta, seberapa besar isu kepemimpinan non-Muslim ini akan juga berdampak dalam pemilihan kepala-kepala daerah di provinsi lainnya. Bila isu pemimpin politik non-Muslim atau politik Islam menjadi perhatian utama dari ABI, akankah pegiat ABI mendirikan partai politik di masa akan datang, ataukah cukup sampai Pilkada di DKI Jakarta?

Penutup

Bentuk dan model gerakan Islam di Indonesia berkembang begitu cepat dan sangat beragam. Persoalan-persoalan sosial dan politik yang ada di Indonesia yang berkembang setidaknya dapat dikatakan masih menjadi bagian dari pertarungan dari Pemilu tahun 2014. Aktor-aktor yang bermain dalam Pilkada DKI Jakarta, setali tiga uang dengan kontestasi dan perebutan Presiden tahun

2014. Namun yang menarik dalam konteks ABI, adalah semakin kentarnya gerakan-gerakan Islam untuk memasuki ruang kehidupan politik di luar keberadaan partai-partai politik Islam. Itu artinya, aspirasi sebagian kelompok Islam tidak dapat diakomodir oleh partai-partai politik Islam yang ada saat ini. Untuk itulah, gerakan sosial Islam yang berupa mewujudkan cita-cita sosial-politik-ekonomi Islam terus bergerak di luar parlemen dan memupuk pandangan masyarakat serta ideologi politik mereka melalui aktivisme sosial, bukan politik praktis.

Artikel ini menekankan bahwa solidaritas dalam bentuk gerakan protes yang dilakukan ABI sangat bersifat temporer dan pegiat ABI yang tergabung dalam wadah GNPF juga sama bentuknya, bersifat sementara, tidak bertahan lama bila dibanding dengan peran pegiat ABI di wadah ormasnya masing-masing. Pandangan ini dilandasi oleh beberapa faktor.

Pertama, penggunaan wadah GNPF MUI akan dirantang oleh situasi dan fakta tentang fatwa-fatwa MUI sendiri. Artinya, seberapa jauh GNPF akan konsisten mengawal fatwa-fatwa MUI dan fatwa-fatwa dalam bidang apa sajakah yang akan 'dikawal' oleh GNPF di masa akan datang. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam pembahasan artikel ini bahwa konsistensi 'memelihara' isu menjadi kunci dalam sebuah gerakan Islam jangka panjang.

Kedua, situasi politik di Indonesia dan hiruk pikuk pasca ABI yang melebar kemana-mana, termasuk upaya saling melaporkan dan upaya saling memenjarakan antara pihak yang saling berseteru, menjadi faktor lain yang mengganggu penguatan wacana secara sistematis di kalangan pegiat ABI. Energi yang dikeluarkan untuk persidangan dan demonstrasi di lapangan tanpa didukung oleh isu besar dan strategis menjadi tantangan besar yang akan dihadapi oleh pegiat ABI.

Ketiga, corak dan model dakwah dari gerakan-gerakan Islam di Indonesia sangat beragam, dan kebutuhan untuk mempertahankan model dakwah dari masing-masing organisasi, jamaah, atau kelompok yang terlibat dalam ABI juga membutuhkan energi yang cukup besar. Karena itu, energi yang selama ini disalurkan melalui ABI, akan terbagi dengan energi untuk aktivitas rutin organisasi masing-masing. Sehingga kohesi dari solidaritas yang terbangun menjadi rentan untuk melonggar.

Keempat, model kepemimpinan di dalam ABI masih mengandalkan model kharismatik, belum membentuk sistem kolegal-kolektif, yang dalam konteks rasionalitas masyarakat modern biasanya tidak dapat bertahan lama. Model

kepemimpinan yang bersifat kharismatik juga sangat rentan dengan perpecahan. Apalagi, proses pemupukan dan penguatan ideologi yang diusung oleh para pegiat ABI belum didukung oleh ketersediaan narasi besar yang dapat dipelajari dan diresapi oleh generasi muda terpelajar di masa akan datang.

Untuk itu, mungkin saja ABI bertransformasi menjadi gerakan sosial Islam yang lebih kuat dan memiliki dampak yang lebih besar dalam masyarakat, bila kemudian para pegiat ABI mampu mengkonsentrasikan energinya untuk sebuah perubahan sosial-ekonomi dan politik yang lebih besar dalam masyarakat. Namun, sampai tulisan ini dibuat, Saya belum melihat potensi ke arah tersebut. Mungkin saja dugaan Saya kurang tepat karena keajaiban bisa saja terjadi. Tetapi kita masih harus menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya pasca Pilkada di DKI Jakarta. Kalah atau menangnya Ahok dalam Pilkada Gubernur kali ini akan menentukan kearah mana ABI serta kelompok-kelompok gerakan Islam yang berada dibelakangnya akan bergerak.



Daftar Pustaka

- Bayat, Asef. *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn*. Stanford: Stanford University Press, 2007.
- Madinier, Rémy. *Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism*. Singapore: National University of Singapore, 2015.
- Hefner, Robert W. "Islam, State, and Civil Society: ICMI and the Struggle for the Indonesian Middle Class," *Indonesia*, No. 56 (Oct., 1993), hlm. 1-35
- Hoesterey, James Bourk. *Rebranding islam: Piety, Prosperity and a Self-Help Guru*. Stanford California, Stanford University Press, 2016.
- Jahroni, Jajang. "Defending the Majesty of Islam: Indonesia's Front Pembela Islam (FPI) 1998-2003," *Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2 (2004), hlm. 197-256.
- Latif, Yudi. *Indonesian Muslim Intellegentia and Power*. Singapore: ISEAS, 2008.
- Wictoriwicz, Quintan (ed.), *Islamic Activism: A Social Movement Theory Approach*. Bloomington & Indianapolis. Indiana University Press, 2004.

PROFIL PENULIS

Abdul Gaffar Karim & Longgina Novadona Bayo, keduanya merupakan dosen di FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Ahmad Najib Burhani, Doktor di bidang Religious Studies dari Universitas California-Santa Barbara. Bekerja sebagai peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Beberapa tulisannya adalah "Lakum diinukun waliya dini: The Muhammadiyah's stance towards interfaith relations," di jurnal *Islam and Christian-Muslim Relations* 2011, 22 (3): 329-342, *Muhammadiyah Jawah* (2010), "Revealing the Neglected Missions: Some Comments on the Javanese Elements of Muhammadiyah Reformism," di jurnal *Studia Islamika* 2005, 12 (1): 101-129, *Sufisme Kota* (2001), *Islam Dinamis* (2001), dan "Defining Indonesian Islam: An Examination of the Construction of National Islamic Identity of Traditionalist and Modernist Muslims" di buku *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations* (Amsterdam: ICAS & Amsterdam University Press, 2012).

Ahmad Suaedy adalah Anggota Board Jaringan GusDurian dan Anggota Ombudsman RI. Pria yang punya pengalaman sebagai Peneliti dan Fasilitator ini adalah Direktur Eksekutif "The Wahid Institute" yang punya komitmen dan keprihatinan intelektual, mengenai agama, perdamaian, dialog, dan juga kesejahteraan masyarakat yang tujuannya, menunjukkan wajah Islam di Indonesia yang plural dan kultural. Dirinya mengambil Sarjana S1, Institute Agama Islam Negeri (IAIN), Yogyakarta dan tamat pada tahun 1990, lalu mengambil Pascasarjana S2 di Universitas Islam Negeri, Jakarta di tahun 2012. Selain itu dirinya juga sebagai LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial). Di tahun 2010-2013 menjadi Anggota Tim Riset "Capital City and Urban Politics in Southeast Asia," CSEAS Kyoto University, di Jepang. Lalu selama Mei 2010 - September 2011 dirinya Melakukan riset tentang Minoritas Muslim di Singapore, Bali and Nusa Tenggara Timur dibiayai oleh Ford Foundation, Jakarta. Dan pada September 2010 hingga February 2011, Melakukan riset tentang Minoritas Muslim di Kamboja and Vietnam

sebagai Visiting Research Fellow at Center for Southeast Asian Studies (CSEAS)-Kyoto University, Jepang. Dan terakhir pada July 2009-March 2010, Melakukan riset tentang Minoritas Muslim di Filipina Selatan, Thailand Selatan dan Penang, Malaysia, sebagai Asian Public Intellectual (API) dibiayai oleh the Nippon Foundation.

Airlangga Pribadi adalah Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga Direktur Centre of Statecraft and Citizenship Studies. Memperoleh gelar Ph.D di Asia Research Centre Murdoch University

Alimatul Qibtiyah adalah Dosen KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. Dapat dihubungi di alamat email: alimatulqibty@gmail.com; alimatul.qibtiyah@uin-suka.ac.id

Fiqh Vredian Aulia Ali adalah Penerima Maarif Fellowship 2015. Sarjana S-1 Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kelahiran Banyuwangi, 23 Oktober 1994 ini merupakan Direktur Unit Kegiatan Mahasiswa LKP2M. Selain itu juga aktif dibeberapa kegiatan lainnya di antaranya sebagai Reporter Majalah Kemahasiswaan Suara Akademika, anggota Unit Mahasiswa HTQ, Anggota ILP2MI, Kabiرو Kajian dan Penelitian LKP2H Malang, dan Wakil Sekretaris Umum Bidang P3A HMI Cabang Malang Komisariat Syari'ah-Ekonomi UIN Malang. Beberapa karya tulis yang pernah diterbitkan di antaranya; *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam* (Malang: Setara Institute, 2015), *Fikih Mazhab Indonesia: Pemikiran Ijtihad Qodri Azizy dalam Konteks Pembaruan Hukum Islam Indonesia* (Lorong: Journal of Social and Cultural Studies, Vol. 3, No. 2, 2014), *Mengurai Benang Kusut Korupsi* (Opini, Koran Pendidikan, Edisi 505/III/19-25 Maret 2014), *Euforia Spiritual Konsumerisme Ramadhan* (Opini, Malang Post, 20 Juli 2013), *Langkah Gontai Gerakan Pramuka* (Opini, Malang Post, 14 Agustus 2013), *Menghadang Terorisme*, (Citizen Reporter, Surya, 2 Desember 2014), *Yang Mencari Kemenangan* (Citizen Reporter, Surya, 20 Juli 2014), *Idealisme Tak Terbeli* (Citizen Reporter, Surya, 8 Juni 2014), *Syarat Peneliti Pemula* (Citizen Reporter, Surya, 20 Maret 2014), *Berumah di Atas Angin* (Citizen Reporter, Surya, 20 Januari 2014), *Mbah Google Bukan Segalanya* (Citizen Reporter, Surya, 25 Juli 2013), *Tahanus di Rowo Bayu* (Citizen Reporter, Surya, 16 Agustus 2013), *Mengoreksi Terorisme dan Jihad* (Citizen Reporter, Surya, 16 September 2013), *Memakmurkan Serambi Masjid* (Citizen Reporter, Surya, 9 Juli 2013), dan *Air Mata di Tanah Mbojo* (Cerpén, dalam Antologi Cerpén FLP Ranting UIN Maliki Malang - Yogyakarta: Aura Pustaka, 2013).